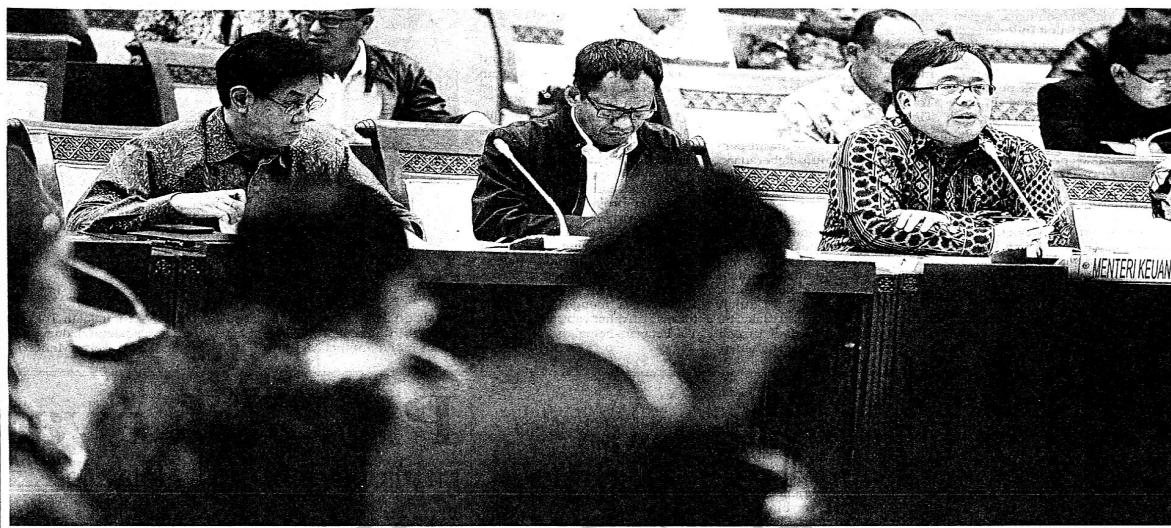




# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : Target Defisit Bisa Teratasi: Instansi Menyampaikan Keberatan Melalui Komisi di DPR  
**Tanggal** : Jumat, 17 Juni 2016  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 17



Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kanan) menyampaikan laporan saat menggelar rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (16/6). Rapat kerja membahas APBN Perubahan 2016.

## Target Defisit Bisa Teratasi

Instansi Menyampaikan Keberatan Melalui Komisi di DPR

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro berharap kenaikan target beberapa sumber pendapatan bisa mengompensasi manakala pemotongan anggaran kementerian dan lembaga negara tak mencapai target Rp 50 triliun. Dengan demikian, target defisit tetap 2,48 persen.

"Solusinya nanti kita lihat keputusan akhir (rapat kerja tingkat badan anggaran). Tidak perlu melebarkan defisit," kata Bambang menjawab pertanyaan *Kompas* di Jakarta, Kamis (16/6).

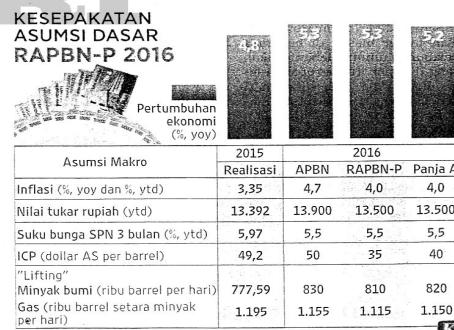
Kenaikan asumsi harga minyak, menurut Bambang, akan menambah target penerimaan negara. Selain itu, ada pula kemungkinan penundaan sejumlah anggaran belanja. Dengan demikian, jika pemotongan anggaran kementerian dan lembaga negara tidak mencapai target Rp 50 triliun, defisit anggaran masih bisa sesuai rencana RAPBN-P 2016. "Kami, kan, pintar cari cara," kata Bambang.

Defisit anggaran APBN 2016 sempat ditargetkan Rp 273 triliun atau 2,15 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Defisit dipastikan melebar di atas 2,5 persen PDB. Untuk itu, pemerintah mengajukan Rancangan APBN Perubahan 2016 kepada DPR dengan target defisit Rp 313 triliun atau 2,48 persen PDB.

Perhitungannya, anggaran belanja kementerian dan lembaga negara dipotong Rp 50 triliun. Kebijakan ini dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016. Sebanyak 87 instansi mendapat jatah pemotongan anggaran mulai dari Rp 2 miliar sampai dengan Rp 8,5 triliun. Soal program yang dipotong atau ditunda, kebijakannya diserahkan kepada setiap instansi.

Secara terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pembahasan tentang sumber-sumber pendapatan ne-



gara. Sejauh ini, keberatan disampaikan melalui komisi mitra di DPR.

Bahkan, menariknya, ada rapat kerja yang sebagian besar anggota DPR justru mengusulkan kenaikan anggaran. Ini terjadi

Anggaran DPR dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Senin lalu.

Saat itu, mayoritas anggota DPR justru meminta anggaran ditingkatkan. Minimal, anggaran